

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan ekonomi daerah terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah senantiasa terus meningkat. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi disektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, transparansi dan akuntabel. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Ruang lingkup reformasi meliputi perubahan struktur anggaran dan proses penganggaran. Perubahan ini dimaksud untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Perubahan tersebut berpegang pada prinsip manajemen keuangan daerah yaitu akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengadilan. Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung berupa rencana yang diperkirakan untuk satu periode tertentu, beserta usulan, cara-cara memenuhi penerimaan dan pengeluaran tersebut.

APBD dalam pengeluaran pemerintah cukup tinggi. Pelaksanaan Anggaran merupakan tahap kedua dari siklus APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Anggaran merupakan ruang lingkup oleh keuangan daerah yang mengelola langsung oleh SKPD masing-masing yang berupa rencana yang akan diwujudkan dalam bentuk financial yang meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Ada beberapa alasan yang menjadikan anggaran pemerintah penting untuk diketahui yaitu :

- Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab kepada masyarakat.

Dalam penganggaran pemerintah dan prinsip-prinsip penganggaran pemerintah diantaranya :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang diharapkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan.

Dinas Pendidikan Sumatera Barat sebagai Dinas Pendidikan yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tujuan agar setiap isu strategis yang merupakan tuntutan dari masyarakat dalam peningkatan pelayanan dapat dipenuhi dan secara proaktif pemerintah dapat mewujudkan dalam bentuk pelayanan prima. Sesuai dengan cita-cita dan keinginan tersebut dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dari berbagai aspek agar mampu berkompetensi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu setiap SKPD harus bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan menyeluruh.

Pelaksanaan Anggaran tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya perencanaan anggaran yang cukup matang dan mantap. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan atau ditetapkan. Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa sangatlah penting, sehingga penulis tertarik untuk mempelajari tentang bagaimana Pembayaran Anggaran Barang dan Jasa sampai terlaksananya anggaran tersebut dengan melakukan kuliah kerja praktek / magang sebagai pengimplementasian teori yang telah didapatkan diperkuliahan dan menuangkannya kedalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul :

“MEKANISME PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT”

Dengan harapan dapat menguasai mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan anggaran barang dan jasa dengan baik dan benar.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang

1.2.1 Tujuan Magang

Adapun tujuan dilaksanakan magang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Melengkapi satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mempraktikkan ilmu teori yang didapat dari perkuliahan kelapangan (Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.

5. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
6. Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
7. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.2.2 Manfaat Magang

- a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja, serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai Mekanisme pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Barang dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Melengkapi salah satu persyaratan sebelum menyelesaikan masa studi.